

STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI SYARIAH NASIONAL DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL: PERAN PEMERINTAH DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Adila Misbahussururi¹, Nisrochah Sholihah², Rinol Sumantri³

adilamisba04@gmail.com¹, nisrochahs@gmail.com²,

rinolsumantrimej@uin@radenfatah.ac.id³

UIN Raden Fatah Palembang

ABSTRAK

Dinamika ekonomi global yang kompleks menuntut pendekatan pembangunan berbasis ketahanan dan keberlanjutan, di mana ekonomi syariah menawarkan alternatif berbasis keadilan, etika, dan keseimbangan sosial. Artikel mengkaji strategi pembangunan ekonomi syariah di Indonesia melalui studi kepustakaan kualitatif, menekankan peran pemerintah (regulasi, kelembagaan, ekosistem terintegrasi) dan lembaga keuangan syariah (pembiayaan riil, inklusi keuangan, inovasi produk syariah). Sinergi keduanya kunci untuk daya saing global dan ketahanan ekonomi nasional berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Pembangunan Ekonomi Nasional, Ketahanan Ekonomi, Peran Pemerintah, Lembaga Keuangan Syariah, Tantangan Global.

ABSTRACT

The complex dynamics of the global economy demand a development approach based on resilience and sustainability, where Islamic economics offers an alternative based on justice, ethics, and social balance. This article examines the Islamic economic development strategy in Indonesia through a qualitative literature review, emphasizing the roles of the government (regulation, institutions, integrated ecosystems) and Islamic financial institutions (real financing, financial inclusion, and Islamic product innovation). The synergy between the two is key to global competitiveness and sustainable national economic resilience.

Keywords: *Islamic Economics, National Economic Development, Economic Resilience, Government Role, Islamic Financial Institutions, Global Challenges.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki komitmen strategis untuk mengembangkan ekonomi syariah dengan target menjadi pusat ekonomi syariah global pada tahun 2045 serta pusat industri halal dunia pada tahun 2024. Cita-cita tersebut mencerminkan kebanggaan nasional sekaligus peluang besar dalam memperkuat peran Indonesia di tingkat internasional. Ekonomi syariah dipandang sebagai sistem yang membawa kemaslahatan karena berlandaskan nilai-nilai ilahiah yang mengatur hubungan ekonomi secara etis dan bertanggung jawab. Sistem ini tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga menekankan terciptanya keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan bagi seluruh pelaku ekonomi. Implementasi ekonomi syariah mencakup penerapan prinsip Islam dalam berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari mekanisme transaksi hingga pengelolaan dan distribusi kekayaan, dengan tujuan akhir mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Meski demikian, arus globalisasi menghadirkan tantangan baru yang menuntut ekonomi syariah untuk terus beradaptasi agar tetap relevan dan berdaya saing.

Globalisasi ekonomi telah mendorong keterbukaan antarnegara dan mengurangi berbagai sekat dalam aktivitas ekonomi, sehingga menciptakan ketergantungan yang semakin kuat di tingkat global. Kondisi ini menjadikan pemahaman terhadap dampak globalisasi sebagai hal yang penting bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Negara yang mampu meningkatkan daya saing serta menerapkan sistem kerja yang efektif akan lebih siap memanfaatkan peluang yang muncul dari integrasi ekonomi global. Dalam konteks tersebut, ekonomi syariah hadir sebagai alternatif sistem ekonomi yang relevan untuk menjawab tantangan globalisasi. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti keadilan sosial, pemerataan distribusi pendapatan, dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, ekonomi syariah memiliki potensi signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada kesejahteraan bersama dan keberlanjutan lingkungan.

Ekonomi syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika globalisasi. Potensi tersebut muncul dari berbagai faktor yang semakin memperkuat posisi ekonomi syariah dalam sistem ekonomi global. Salah satu faktor utama adalah dominasi penduduk Muslim di Indonesia, yang menjadikan ekonomi syariah sebagai sistem yang relevan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang ekonomi dan keuangan. Selain itu, keterbukaan pasar internasional memberikan ruang yang luas bagi perkembangan ekonomi syariah, karena memungkinkan institusi dan pelaku usaha dari berbagai negara untuk berinteraksi dan beroperasi lintas batas. Seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ekonomi syariah di era globalisasi, permintaan terhadap produk keuangan berbasis syariah, seperti sukuk, asuransi syariah, serta instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip Islam, terus mengalami peningkatan. Keberadaan ekonomi syariah juga berperan sebagai alternatif dalam memperluas diversifikasi ekonomi dan investasi, sekaligus membantu meminimalkan risiko akibat ketidakstabilan pasar global. Nilai-nilai utama ekonomi syariah, seperti keadilan sosial, pemerataan distribusi pendapatan, dan kepedulian terhadap lingkungan, selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus banyak negara saat ini. Oleh karena itu, ekonomi syariah berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian global, termasuk dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia.

Stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional menjadi faktor pendorong penting dalam mempercepat pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi yang relatif konsisten telah membentuk fondasi yang kuat bagi upaya diversifikasi ekonomi, termasuk penguatan sektor ekonomi syariah. Ketahanan ekonomi yang semakin baik membuka ruang bagi pengembangan sektor-sektor baru yang berbasis syariah, seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan minat masyarakat. Di samping itu, peran aktif pemerintah menjadi elemen krusial dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan. Komitmen pemerintah tercermin melalui penyusunan berbagai

kebijakan dan program strategis yang bertujuan memperkuat sektor ekonomi syariah secara menyeluruh.

Kebijakan tersebut meliputi penguatan kerangka regulasi yang mendukung aktivitas ekonomi syariah, termasuk pengembangan industri halal dan optimalisasi fungsi lembaga keuangan syariah. Pemerintah juga mendorong peningkatan literasi dan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah guna memperluas partisipasi publik. Dari sisi infrastruktur, strategi yang dijalankan mencakup pembangunan ekosistem industri halal yang terintegrasi, seperti pengembangan kawasan industri halal serta penguatan rantai pasok produk berbasis syariah. Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah berupaya membangun dasar yang kuat untuk mewujudkan Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi syariah di tingkat global.

Peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan diwujudkan melalui pelaksanaan kebijakan yang terencana dan berkesinambungan. Berbagai kebijakan strategis dirancang untuk mencakup pembenahan kerangka regulasi, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah, serta penguatan sarana dan prasarana pendukung. Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah berperan penting dalam membangun iklim yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, yang selanjutnya diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional secara menyeluruh. Didukung oleh kondisi pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil serta kebijakan strategis pemerintah, seperti Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024, Indonesia telah memiliki dasar yang kuat dalam mengoptimalkan pengembangan sektor ekonomi syariah. Meskipun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, terutama terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang belum sepenuhnya optimal serta lemahnya sinergi dan koordinasi antar lembaga yang terlibat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian pustaka, yaitu dengan mempelajari aneka sumber referensi yang relevan seperti buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, dan situs internet yang mengulas akad ijarah dan implementasinya di lembaga keuangan syariah, terutama di bank syariah di Indonesia. Penelitian ini difokuskan untuk menggali teori-teori fundamental serta konsep-konsep praktis yang berkaitan dengan akad ijarah dalam konteks sistem perbankan Islam. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan dapat diperoleh informasi yang cukup untuk mendukung penulisan jurnal serta mencapai kesimpulan yang objektif, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Ekonomi Syariah sebagai Strategi Nasional

Ekonomi syariah diposisikan sebagai salah satu pendekatan strategis dalam menjaga dan memperkuat kestabilan perekonomian nasional. Upaya peningkatan ketahanan ekonomi Indonesia dapat dilakukan melalui penerapan berbagai strategi ekonomi syariah yang terintegrasi. Strategi tersebut mencakup beragam dimensi, mulai dari perumusan kebijakan fiskal yang selaras dengan prinsip syariah hingga penguatan ekonomi masyarakat berbasis syariah. Langkah konkret yang dilakukan

antara lain pengembangan rantai pasok industri halal, optimalisasi peran lembaga keuangan syariah, peningkatan literasi ekonomi syariah di tengah masyarakat, penguatan kerja sama internasional berbasis nilai-nilai syariah, serta pemanfaatan teknologi digital dalam ekosistem ekonomi syariah. (Indah et al., 2024)

Kondisi pertumbuhan ekonomi yang konsisten berperan sebagai pendorong utama dalam mengarahkan Indonesia menuju penguatan dan perluasan ekonomi syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, capaian pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil telah membentuk fondasi yang kuat bagi upaya diversifikasi perekonomian, termasuk pengembangan sektor berbasis syariah. Meningkatnya stabilitas serta daya tahan ekonomi nasional membuka ruang yang lebih luas untuk pengembangan lanjutan, khususnya pada sektor ekonomi syariah yang menunjukkan perkembangan signifikan. Di samping faktor pertumbuhan ekonomi, keterlibatan aktif pemerintah Indonesia menjadi elemen krusial dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang berkesinambungan. Komitmen tersebut tercermin melalui perumusan dan pelaksanaan berbagai kebijakan serta program strategis yang diarahkan untuk memperkuat dan mempercepat pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. (Helyatul Millah, Saniatun Najiyah, 2025)

Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Era Globalisasi

Globalisasi menandai suatu fase ketika sistem ekonomi, budaya, dan teknologi dunia saling terhubung secara intensif, sehingga batas-batas wilayah dan kedaulatan negara menjadi semakin tidak tegas. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi, didukung oleh kemajuan sarana transportasi serta keterbukaan perdagangan dan investasi internasional, menjadi faktor utama yang mendorong proses integrasi tersebut. Dalam konteks ini, pergerakan barang, jasa, modal, dan arus informasi terjadi dengan sangat cepat dan meluas, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi serta kerja sama lintas negara dan antar masyarakat global. Seiring dengan dinamika tersebut, ekonomi Islam mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di Indonesia. Namun demikian, tantangan yang dihadapi ekonomi syariah dalam menghadapi masa depan di tengah arus globalisasi masih tergolong kompleks dan memerlukan perhatian serius.

Berbagai kendala utama yang dihadapi ekonomi syariah di era globalisasi antara lain adalah sulitnya mengharmonisasikan prinsip-prinsip syariah dengan standar internasional, seperti International Financial Reporting Standards (IFRS). Selain itu, perbedaan penafsiran fiqh muamalah di berbagai negara berpenduduk Muslim turut memengaruhi keseragaman penerapan ekonomi syariah. Rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap konsep dan praktik ekonomi syariah, serta adanya kesenjangan antara kerangka teoretis dan implementasi di lapangan, juga menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain, perbedaan sistem regulasi antara negara Muslim dan non-Muslim, serta dominasi kebijakan ekonomi global yang masih berlandaskan sistem konvensional, menyebabkan ekonomi syariah harus terus beradaptasi agar mampu bersaing dan berkembang secara berkelanjutan. (Siregar & Anggraini, 2025)

Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Syariah

Dalam perspektif ekonomi Islam, keterlibatan pemerintah memiliki posisi yang sangat strategis karena tingkat kesejahteraan masyarakat dijadikan sebagai tolok ukur utama keberhasilan suatu negara. Islam menempatkan pemerintah sebagai aktor sentral yang bertanggung jawab dalam mengatasi persoalan ekonomi masyarakat, termasuk mengurangi kesulitan finansial serta menjamin terbukanya akses yang adil bagi seluruh warga negara untuk mengembangkan potensi

ekonominya. Pembentukan negara dalam pandangan Islam bertujuan untuk mengemban tanggung jawab kolektif, di antaranya memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta menciptakan sistem distribusi kekayaan dan pendapatan yang berkeadilan.

Peran tersebut diwujudkan melalui penyusunan regulasi dan kebijakan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem ekonomi dan keuangan nasional. Di Indonesia, landasan hukum pengembangan perbankan syariah antara lain tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Nomor 1/POJK.07/2013 yang mengatur penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bank syariah, serta Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 yang mengatur pelaksanaan tata kelola pada bank syariah. Keseluruhan regulasi tersebut menjadi instrumen penting dalam memperkuat peran pemerintah dalam membangun sistem ekonomi syariah yang adil, stabil, dan berkelanjutan.(Asyari Hasan, 2024)

Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

Lembaga keuangan syariah memiliki posisi strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional melalui perannya sebagai perantara keuangan yang mengedepankan prinsip keadilan dan keterbukaan. Berbagai kajian terkini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah mampu memperluas jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat, memperkuat pembiayaan kegiatan usaha produktif, serta meningkatkan inklusi ekonomi, khususnya di wilayah terpencil dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kontribusi tersebut tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, sehingga mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Peran strategis ini tampak baik dalam kondisi ekonomi normal maupun pada situasi luar biasa, seperti masa pandemi, ketika perbankan syariah berperan aktif dalam menopang proses pemulihan ekonomi.

Lebih lanjut, lembaga keuangan syariah berperan penting dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan landasan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan, lembaga keuangan syariah memiliki peluang besar untuk memberdayakan masyarakat di daerah yang masih minim akses layanan keuangan, sehingga mereka dapat mengelola sumber daya finansial secara lebih efektif serta memperoleh akses terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi mereka. Selain itu, pengalaman menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah relatif tangguh dan efisien dalam menghadapi tekanan krisis ekonomi, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam penguatan dan pemberdayaan sektor ekonomi kecil dan menengah di berbagai wilayah.(Putri et al., 2024)

Sinergi Pemerintah dan Lembaga Keuangan Syariah

Keterpaduan peran antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah menjadi faktor strategis dalam pengembangan ekonomi syariah di tingkat nasional. Pemerintah bertindak sebagai pengarah dan pendukung melalui penyusunan kebijakan, regulasi, serta pelaksanaan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah menjalankan fungsi operasional dengan menghadirkan berbagai produk dan layanan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Kerja sama yang terjalin antara kedua pihak tersebut terbukti mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan

syariah, memperkuat ketahanan sistem keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan.

Berdasarkan kajian Samud et al. (2025), sinergi tersebut tercermin dalam:

1. Kebijakan dan regulasi pemerintah yang mendukung pertumbuhan keuangan syariah.
2. Program literasi dan inklusi keuangan syariah nasional yang melibatkan lembaga keuangan syariah.
3. Digitalisasi layanan keuangan syariah, termasuk fintech syariah, untuk menjangkau masyarakat luas.
4. Inovasi produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. (Shadiq & Hasanah, 2025)

Strategi Penguatan Daya Saing Ekonomi Syariah Indonesia

Kerangka Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) merumuskan sejumlah strategi utama dalam pengembangan ekonomi syariah nasional. Strategi pertama berfokus pada penguatan rantai nilai halal melalui pembentukan dan pengembangan pusat-pusat industri halal, khususnya yang menasar sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk memperluas partisipasi pelaku usaha skala kecil, meningkatkan inklusivitas ekonomi, serta mendorong pertumbuhan yang merata. Strategi kedua diarahkan pada penguatan sektor keuangan syariah, dengan menegaskan peran strategis perbankan syariah dalam pembiayaan proyek-proyek prioritas yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan peningkatan aset perbankan syariah, MEKSI menempatkan sektor ini sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional, sekaligus memberikan optimisme terhadap prospek pengembangan ekonomi syariah di masa mendatang.

Selanjutnya, strategi ketiga menitikberatkan pada pemberdayaan UMKM sebagai aktor kunci dalam rantai nilai produk halal. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan literasi dan edukasi terkait pembiayaan syariah, serta dorongan terhadap kepemilikan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, sehingga tercipta basis yang kuat bagi perkembangan sektor tersebut dalam ekosistem ekonomi syariah. Adapun strategi keempat menekankan pemanfaatan ekonomi digital sebagai sarana pengembangan ekonomi syariah, yang mencerminkan respons MEKSI terhadap kemajuan teknologi serta perubahan pola aktivitas ekonomi di era digital. (Millah et al., 2025)

Analisis Peran Ekonomi Syariah dalam Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional

Ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam memperkuat daya tahan perekonomian nasional karena karakter sistemnya yang menitikberatkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesinambungan. Berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional yang banyak bergantung pada praktik utang dan aktivitas spekulatif, ekonomi syariah mengedepankan mekanisme berbagi risiko, keterhubungan yang kuat dengan sektor riil, serta pelarangan terhadap riba dan unsur spekulasi berlebihan. Karakteristik tersebut menjadikan ekonomi syariah lebih tangguh dalam merespons tekanan dan gejolak ekonomi global, seperti krisis keuangan dan fluktuasi pasar, sehingga berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Berbagai instrumen dalam ekonomi syariah, seperti zakat, wakaf, perbankan syariah, dan sukuk, berperan penting dalam memperkuat fondasi ketahanan ekonomi nasional. Zakat dan wakaf berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan

yang efektif untuk menekan kesenjangan sosial serta meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok yang kurang beruntung. Di sisi lain, perbankan syariah melalui pola pembiayaan berbasis kemitraan dan bagi hasil mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi yang produktif serta memperkuat sektor riil, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. Sementara itu, sukuk menjadi alternatif pembiayaan pembangunan yang relatif lebih stabil karena didukung oleh aset nyata dan tidak memicu akumulasi risiko utang yang berlebihan. Keterpaduan pemanfaatan instrumen-instrumen tersebut mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berorientasi jangka panjang.

Selanjutnya, pengembangan ekonomi syariah juga berdampak pada penguatan ketahanan sosial dan kelembagaan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari ketahanan ekonomi nasional. Implementasi nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah mendorong terbentuknya sistem ekonomi yang tidak semata-mata mengejar pertumbuhan, tetapi juga mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Dengan dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten serta penguatan institusi ekonomi syariah, sistem ini berpotensi menjadi pilar strategis dalam menghadapi dinamika ekonomi global sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional Indonesia. (Sugianto, 2025)

Pembahasan

1. Pembangunan Ekonomi Syariah sebagai Strategi Nasional

Ekonomi syariah di Indonesia telah ditetapkan sebagai pendekatan strategis untuk memperkuat stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional. Strategi ini bersifat multidimensi, mencakup penyelarasan kebijakan fiskal dengan prinsip syariah hingga penguatan ekonomi masyarakat. Fokus utama strategi nasional ini meliputi:

- Pengembangan Rantai Pasok Halal: Membangun ekosistem industri halal yang terintegrasi untuk meningkatkan daya saing global.
- Penguatan Lembaga Keuangan: Mengoptimalkan peran bank syariah dan lembaga keuangan non-bank dalam mendukung sektor riil.
- Literasi dan Digitalisasi: Meningkatkan pemahaman masyarakat serta memanfaatkan teknologi digital (fintech syariah) dalam ekosistem ekonomi.

2. Tantangan di Era Globalisasi

Meskipun menunjukkan pertumbuhan signifikan, ekonomi syariah menghadapi tantangan kompleks dalam integrasi global:

- Harmonisasi Standar: Kesulitan menyelaraskan prinsip syariah dengan standar internasional seperti International Financial Reporting Standards (IFRS).
- Divergensi Fikih: Perbedaan penafsiran fikih muamalah antarnegara Muslim yang menghambat keseragaman penerapan global.
- Kesenjangan Literasi: Masih rendahnya pemahaman masyarakat serta adanya jarak antara teori ekonomi syariah dengan implementasi praktis di lapangan.

3. Peran Pemerintah dan Regulasi

Pemerintah Indonesia berperan sebagai aktor sentral dalam menciptakan ekosistem yang kondusif melalui fungsi regulasi dan koordinasi.

- Landasan Hukum: Penguatan melalui UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta berbagai peraturan OJK (POJK) untuk memastikan tata kelola yang baik.
- Infrastruktur Kebijakan: Penyusunan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024 sebagai panduan strategis pembangunan sektor halal dan keuangan syariah.

4. Peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

LKS berfungsi sebagai perantara keuangan yang mengedepankan keadilan dan inklusivitas. Peran strategis LKS meliputi:

- Pemberdayaan UMKM: Memperluas akses pembiayaan bagi sektor produktif dan UMKM, terutama di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan konvensional.
- Ketahanan Krisis: Karakteristik bagi hasil dan keterhubungan dengan sektor riil membuat LKS cenderung lebih tangguh menghadapi fluktuasi pasar global dibandingkan sistem spekulatif.

5. Sinergi Strategis dan Ketahanan Ekonomi

Kunci keberhasilan pembangunan ekonomi syariah terletak pada sinergi antara kebijakan pemerintah (regulator) dan operasional LKS (pelaksana).

- Instrumen Sosial-Ekonomi: Integrasi instrumen seperti zakat dan wakaf untuk distribusi kekayaan, serta sukuk sebagai alternatif pembiayaan pembangunan yang stabil karena didukung aset nyata (underlying asset).
- Output Strategis: Kerja sama ini menghasilkan peningkatan inklusi keuangan, penguatan modal sosial melalui nilai maqāṣid al-syarī'ah, dan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Pembangunan ekonomi syariah di Indonesia merupakan strategi nasional multidimensi yang bertujuan untuk memperkuat stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global. Keberhasilan visi Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah global pada tahun 2045 sangat bergantung pada dua pilar utama:

a. Peran Sentral Pemerintah dan Regulasi

Pemerintah bertindak sebagai pengarah strategis melalui:

- Penyusunan Regulasi: Memperkuat landasan hukum melalui UU No. 21 Tahun 2008 dan berbagai Peraturan OJK untuk menjamin tata kelola yang baik.
- Infrastruktur Kebijakan: Mengimplementasikan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024 yang berfokus pada penguatan rantai nilai halal, keuangan syariah, UMKM, dan ekonomi digital.
- Penyediaan Ekosistem: Membangun kawasan industri halal dan memperkuat rantai pasok produk berbasis syariah.

b. Peran Strategis Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

LKS berfungsi sebagai pelaksana operasional yang mendorong inklusivitas melalui:

- Pemberdayaan Sektor Riil: Memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan masyarakat di daerah terpencil yang belum terjangkau layanan konvensional.
- Ketahanan Terhadap Krisis: Mengedepankan prinsip berbagi risiko (bagi hasil) yang membuat sistem ini lebih tangguh terhadap fluktuasi pasar global dan spekulasi dibandingkan sistem konvensional.

3. Sinergi dan Instrumen Sosial

Kunci ketahanan ekonomi nasional terletak pada sinergi antara kebijakan pemerintah dan operasional LKS. Integrasi instrumen ekonomi syariah seperti zakat, wakaf, dan sukuk terbukti mampu menekan kesenjangan sosial sekaligus menjadi alternatif pembiayaan pembangunan yang stabil karena didukung oleh aset nyata (underlying asset).

Meskipun potensinya besar, Indonesia masih harus menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi masyarakat, perlunya harmonisasi standar syariah dengan

standar internasional (seperti IFRS), serta perbedaan penafsiran fikih muamalah antar negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyari Hasan, A. N. (2024). Peran Pemerintah Dalam Memajukan Ekonomi Syariah di Indonesia. 10(September), 187–196.
- Helyatul Millah, Saniatun Najiyah, K. N. (2025). Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia menjadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business*, Volume 03,.
- Indah, S., Yuwana, P., Ekonomi, S., Mutmainnah, M., Indah, S., Yuwana, P., Kiai, U. I. N., Achmad, H., Jember, S., & Ekonomi, S. (2024). Strategi Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia. 4.
- Millah, H., Najiyah, S., & Novitasari, K. (2025). Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia menjadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia. 03(1), 28–37.
- Putri, W., Lestari, E., Susanti, S., Atmajayanty, S. A., Islamia, N. D., Sumbawa, U., Besar, S., Info, A., History, A., Institutions, I. F., & Access, F. (2024). Peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan akses keuangan pada daerah terpencil. 269–275.
- Shadiq, T. F., & Hasanah, H. (2025). Inclusion and Literacy , Strategies for the Future of Islamic Finance. 3(1), 144–153.
- Siregar, T. H., & Anggraini, T. (2025). Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Di Era Globalisasi. 5(1), 282–294.
- Sugianto, E. (2025). Analysis of The Role of Islamic Economics in Improving National Economic Resilience. 2(1), 26–37.